

Nomor : 40/UMUM/MHM/DIR/I/2024

Mataram, 25 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

DPD PERBARINDO NTB

di -

Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2023

Dengan hormat,

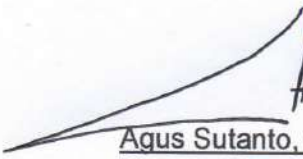
Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023 PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram


bank
mitra harmoni
bpr mitra harmoni mataram


Agus Sutanto, ST
Direktur Utama


I Gede Rai Yudiantika, SE
Direktur

Cc - Arsip

Nomor : 39/UMUM/MHM/DIR/I/2024

Mataram, 25 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Media BPR

di -

Tempat

**Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2023**

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023 PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram



bank
mitra harmoni
bpr mitra harmoni mataram

Agus Sutanto, ST
Direktur Utama


I Gede Rai Yudiatnika, SE
Direktur

Cc - Arsip

Nomor : 06/OJK/MHM/DIR/II/2024

Mataram, 25 Januari 2024

Kepada Yth. :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Yos Sudarso No 4 Ampenan

Kota Mataram

**Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2023**

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023 PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram


Agus Sutanto, ST
Direktur Utama


I Gede Rai Yudiatmika, SE
Direktur

Cc - Arsip

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666509-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602652-26012024172702

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

iwan2218@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 17:27:02



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Langko No. 14 Dasan Agung

Nomor Telepon : (0370) 7862718

Penjelasan Umum : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram didirikan berdasarkan akta Notaris No.38 tanggal 16 Oktober 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 07 tanggal 01 Desember 2023, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09 -0192068 tanggal 04 Desember 2023. PT. BPR Mitra Harmoni Mataram beroperasi sejak Agustus 2010 yang berkantor pusat di Jalan Langko No.14 Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko stratejik. Dengan diberlakukannya POJK No 04/ POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berasaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Agus Sutanto, ST	Direktur Utama	Mengkoordinir semua aktivitas BPR dengan sebaik-baiknya untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien;Menjamin pelaksanaan operasional perusahaan sesuai ketentuan perbankan&perundang-undangan yang berlaku;Menciptakan citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat;Bertanggung jawab atas tercapainya target sesuai anggaran yang ditetapkan dan seluruh penerapan dan pengawasan program APU dan PPT;Menciptakan struktur pengendalian intern,terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern;Menyusun kebijakan dan pedoman serta memastikan berjalannya penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko,mengembangkan budaya tersebut pada seluruh jenjang organisasi; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi;Memastikan peningkatan kompetensi SDM;Memastikan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko beroperasi secara independen;Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas pelaksanaan kepengurusan Bank melalui RUPS;Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan TI,rencana kegiatan meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta penerapan budaya kepatuhan dan anti fraud;Mewakili BPR di dalam dan luar Pengadilan, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga,menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan dengan batasan yang jelas;Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya;Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus,risalah RUPS,risalah rapat Direksi,laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR;Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen;Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	I Gede Rai Yudiatmika, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Mengkoordinir semua aktivitas BPR sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal agar pertumbuhan perusahaan optimal, sehat dan efisien serta tercapainya target sesuai anggaran yang ditetapkan; Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU dan PPT; Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern; Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta menyusun kebijakan dan pedomannya secara tertulis; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi; Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; Memastikan peningkatan kompetensi SDM; Bersama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan TI, bertanggungjawab terhadap penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud; Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas; Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya; Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham; Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR; Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan; Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Ketut Komplit, SH	Komisaris Utama	Memastikan Operasional BPR berjalan sesuai ketentuan berlaku;Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi&mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan;Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait;Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. &rencana juga pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan;Memastikan BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud;Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APU&PPT;Menyetujui seluruh SOP;Menyetujui dan mengevaluasi RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran;Mengadakan rapat bulanan dan triwulan;Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester;Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya;Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi;Melakukan pengawasan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi;Memantau &mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil temuan;Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan&suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Drs. I Gede Budiasa	Komisaris	Bersama-sama Komisaris Utama: memastikan Operasional BPR berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, memberi nasehat kepada Direksi, memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko, memastikan & mengevaluasi penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi, mengevaluasi & memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait, memastikan Direksi memiliki rencana % melaksanakan kegiatan meningkatkan Literasi & Inklusi Keuangan, memastikan penyelenggaraan dan pengembangan TI, memastikan BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud, mengawasi secara aktif pelaksanaan penerapan Program APU & PPT, menyetujui dan mengevaluasi RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham, melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran, mengadakan rapat bulanan & triwulan, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester dan instansi berwenang setiap semester, melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya, mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, melakukan pengawasan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi, memantau & mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit & atau rekomendasi dari hasil temuan, memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan & suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Rekomendasi Kepada Direksi

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Sutanto, ST	Agus Sutanto, ST	tidak ada	tidak ada
2	I Gede Rai Yudiatmika, SE	I Gede Rai Yudiatmika, SE	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Sutanto, ST	Agus Sutanto, ST	tidak ada	tidak ada
2	I Gede Rai Yudiatmika, SE	I Gede Rai Yudiatmika, SE	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Komplit, SH	I Ketut Komplit, SH	tidak ada	tidak ada
2	Drs. I Gede Budiasa	Drs. I Gede Budiasa	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Komplit, SH	I Ketut Komplit, SH	tidak ada	tidak ada
2	Drs. I Gede Budiasa	Drs. I Gede Budiasa	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	297000000	2	114000000
2	Tunjangan	2	260600000	2	114000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		557600000		228000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	2 unit rumah kontrakan	1 unit rumah kontrakan
2	Transportasi	2 unit mobil dinas	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,18	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,61	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,26	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,71	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,89	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30-01-2023	3	Pertumbuhan kredit melalui data base debitur existing dan debitur lunas lancar;Maping penabung untuk kredit back to back;Pengembangan agen chaneling;Evaluasi produktifitas marketing;Pemasaran kredit pada sector UMKM dengan target plafon di bawah Rp. 100 juta;P2K assessment setiap debitur restrukturisasi;Penyelesaian NPL dengan skala prioritas ;Tetap mengoptimalkan penagihan kredit WO;Penyelesaian kol 5 terutama yang akan membentuk PPAP;Meningkatkan saldo tabungan berhadiah;Mengolah data pasif menjadi aktif;Branding-branding dengan membuat video youtube, spanduk, banner dan mengadakan event-event di tahun 2023;Target struktur dana murah;Produktifitas SDM harus ditingkatkan;Peningkatan soft skill dengan memanfaatkan teknologi
2	27-02-2023	3	Pertumbuhan kredit tetap dengan 8 pilar;Pemasaran dengan sistem broadcast WA ke nasabah lancar untuk penawaran kompensasi;Evaluasi pendapatan bunga kredit;Bagian kredit kolaborasi dengan bagian FO;Monitoring kredit jatuh tempo;Pencegahan NPL binaan P2k melalui sms blast, WA dan telepon;Action plan nasabah NPL;Optimalkan PPOB untuk menambah pendapatan;Pemasaran tabungan umroh;Optimalisasikan tabungan berhadiah ;Programkan Cross selling dan up selling untuk nasabah yang sudah bergabung dengan BPR;Perbanyak pelatihan bagian bisnis; Evaluasi kredit dropping diatas tgl 25;Penagihan tunggakan dimaksimalkan untuk menambah pendapatan;Peningkatan DPK melalui pengembangan database internal dan komunitas;Analisis mobil kas keliling agar lebih optimal;Tata kelola ditingkatkan dan main risk dikembangkan;Peningkatan peran SKAI dengan rutin OTS
3	27-03-2023	3	Nasabah existing untuk menjadi prioritas kredit;Maping nasabah berdasarkan sector ekonomi;Focus 1 wilayah untuk 1 AO;Mengembangkan komunitas wilayah Mataram;Analisis tunggakan 1 dan 2 yang masih memiliki dana pada tabungan;Evaluasi pendapatan bunga kredit;WO (Write Off) untuk tetap dilakukan penagihan;Pemantauan PPAP kolektibilitas kol 5 kapan kewajibannya;Monitoring PPAP kredit;Membuat action plan nasabah NPL;Optimalkan PPOB untuk menambah pendapatan;Pemasaran tabungan umroh;Optimalisasikan tabungan berhadiah;Pengembangkan tabungan yang pengambilannya tidak terlalu intens;Optimalkan mobil kas keliling masuk ke komunitas-komunitas agar lebih produktif;Programkan Cross selling dan up selling untuk nasabah yang sudah bergabung dengan BPR;Pelatihan untuk seluruh karyawan yaitu Word dan Excel;PPOB kerjasama dengan BPJS terkait fee based income untuk meningkatkan pendapatan
4	17-04-2023	3	Pertumbuhan kredit dengan fokus plafon di bawah Rp. 100 juta;Pemasaran melalui media social, broadcast ke nasabah;Penambahan 1 orang AO;Pemasaran gebyar kredit 0.99%;Maping nasabah berdasarkan sector ekonomi;Kerjasama dengan bagian FO dalam menawarkan kredit back to back;Membuat progress tunggakan 3 untuk prioritas penyelesaian;Penagihan WO (Write Off), untuk tetap dilakukan;Membuat action plan nasabah NPL;Optimalkan PPOB dan BPR E-Cash untuk menambah pendapatan;Pengembangan tabungan focus pada sector ekonomi yang turn overnya tidak cepat;Target tabungan pasif menjadi aktif kembali;Optimalkan mobil kas keliling;Evaluasi jalur FO yang dilalui untuk meningkatkan produktifitas dan mengefisiensi waktu;Membuat program pengembangan SDM;Evaluasi dropping AO yang tumbuh;Perluas relasi dan jaringan kredit dengan strategi pertumbuhan Number Of Account dengan one customer get to customer;Promosi secara continue melalui media social;Review kembali kredit lancar;Kredit back to back tetap dipasarkan;Evaluasi suku bunga DPK secara rutin untuk menurunkan biaya bunga;Cut off nasabah kecil yang tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan tabungan;Evaluasi mobil kas keliling , hitung semua biaya yang dikeluarkan dalam 1 bulan dan pengendapannya untuk mengetahui apakah dengan adanya mobil kas keliling menjadi lebih efektif atau tidak;Strategi pertumbuhan Number Of Account dengan metode One deposan, one saving;Analisis keaktifan dari masing-masing FO;Evaluasi jalur FO yang dilalui untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi;Kepatuhan pantau nasabah yang risiko tinggi dan pastikan SOP sudah berjalan dengan baik;Peningkatan peran SKAI dan kepatuhan dengan melakukan OTS diperbanyak setiap bulannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
5	17-05-2023	3	Meningkatkan produktifitas;Inovasi produk kredit;Meningkatkan promosi baik melalui media cetak,media elektronik maupun media sosial;Meningkatkan database nasabah lancar;Mengelola dan memonitoring tunggakan dari T2 , T3 sampai dengan kol 5;Menargetkan penyelesaian NPL dengan skala prioritas;Memberikan reward bagian P2K terhadap penurunan tunggakan , penurunan NPL dan penagihan WO;Nasabah existing menjadi target pertumbuhan;Tabungan fokus disektor ekonomi yang memiliki turn over yang tidak cepat;Deposito mencari refrensi dari nasabah-nasabah yang sudah bergabung dengan BPR;Depositor yang tidak memiliki tabungan, untuk diaktifkan kembali;Wawanisasi terkait dengan pelatihan komputer untuk di jadwalkan;Mapping sektor yang memiliki pinjaman Rp. 200 juta;Manajemen diharapkan membuat AO khusus pada plafon Rp. 100 juta ke atas;Evaluasi nasabah retail;Data komunal ambil rate B+;Lakukan penilaian ulang jaminan pada saat penagihan;Mapping nasabah berdasarkan sector ekonomi khususnya perdagangan untuk dapat dikembangkan;Evaluasi nasabah inti;Mengoptimalkan struktur dana murah harus lebih tinggi dari deposito;Evaluasi mobil kas keliling;Strategi pertumbuhan Number Of Account dengan metode One deposan, one one saving;Evaluasi cost of found nya;Optimalkan fungsi Desk call;Rencanakan pelatihan minimal 5% dari BTK tahun lalu;Pelatihan analisa kredit;Peran SKAI terhadap temuan OJK untuk tetap dipantau;Kabid operasional melakukan pemantauan secara rutin untuk likuiditas dan penempatan ABA
6	19-06-2023	3	Pengembangan kredit dengan 8 pilar dan tetap bekerjasama dengan pihak komunal;Pengelompokkan usaha produktif untuk target pengembangan;Targetkan nasabah tabungan menjadi nasabah kredit;Optimalkan fungsi Desk call;Program penyelesaian kredit;Pemberian surat tagihan kepada debitur T2 dan T3 oleh bagian P2K;Kredit kategori NPL dilakukan penanganan dengan skala prioritas;Branding media sosial;Optimalkan mobil kas keliling;Strategi pertumbuhan Number Of Account;Masuk ke komunitas-komunitas yang berada diwilayah mataram dan lombok barat;Optimalkan tabungan umroh ,tabungan harmoni berhadiah dan tabungan simphoni;Upayakan setiap debitur mengikuti tabungan berjangka (tabungan simphoni);Memberikan inhouse training kepada seluruh karyawan.
7	27-07-2023	3	Kerjasama dengan pihak komunal dengan jumlah plafon yang dibatasi;Kolaborasi dengan bagian Funding;Branding produk didaerah potensi perdagangan diwilayah kerja AO masing-masing;Pertumbuhan kredit secara maksimal dengan tetap memperhatikan prudential banking;Restruk/kompensasi bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan membayar;Pencegahan NPL Pembinaan dilakukan dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian AO khususnya untuk kredit lancar dan T1 , sedangkan bagian P2K menangani kredit T2, T3 beserta NPL;Melakukan somasi dan gugatan sederhana;Cross selling dan up sellingdi bagian Dana;Optimalisasi peran dilingkungan kantor kas;Pengembangan database pertumbuhan NOA dengan metode one deposan one saving;Tetap memasarkan produk melalui media sosial dan digitalisasi;Untuk marketing eksekutif yang difasilitasi dengan mobil kas keliling untuk fokus pemasaran dan sosialisasi di komunitas;Bagian SDM Memberikan inhouse training kepada seluruh karyawan.
8	30-08-2023	3	Pengembangan kredit dengan plafon Rp. Rp 25 s.d 50 Juta;Menargetkan nasabah existing untuk ditawarkan kredit kembali;Mencari sector ekonomi yang berpotensi misal sector ekonomi dagang dan jasa;Fokuskan Penentuan wilayah per AO dan mengembangkan komunitas;Membuat program penyelesaian tunggakan, khususnya T2 dan T3;Membuat action plan nasabah NPL,buat strategi penyelesaian, dan yang dapat diselesaikan menjadi prioritas kredit restrukturisasi yang telah di masukkan ke pojok 33,histori pembayarannya untuk tetap di pantau;Melakukan somasi dan gugatan sederhana;Mengolah data pasif menjadi aktif;Maintenance deposito yang akan jatuh tempo;Melakukan pemantauan cash in & cash out pada Dana Pihak Ketiga;Mengembangkan tabungan berhadiah, tabungan simphoni dan tabungan umroh;Memprogramkan Cross selling dan up selling;Pengembangan database pertumbuhan NOA dengan metode one deposan one saving;Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan FGD secara continu;Buat program tabungan yang bisa ditarik pada saat siswa/i lulus sekolah;Evaluasi mesin EDC, apakah dengan adanya EDC dapat meminimalisir waktu penjemputan atau tidak;Nasabah deposito diwajibkan membuka tabungan berjangka;Mengevaluasi jalur FO yang dilalui untuk mengefisensikan waktu dan biaya;Memangkas tabungan retail, dan menargetkan tabungan middle untuk menjadi target pertumbuhan;Evaluasi SMS Notifikasi , apa dengan adanya SMS tersebut tunggakan bisa menurun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
9	26-09-2023	3	Pertumbuhan nasabah baru dengan metode One Customer get to Customer;Debitur lunas lancar dan bakidebet KYD 50% menjadi prioritas penawaran kredit kembali;Pengembangan wilayah 1 desa, untuk 1 AO;Evaluasi plafon kredit Rp. 5 juta kebawah;Buat data penabung yang sudah jadi nasabah kredit dan yang belum jadi nasabah;Pencegahan NPL binaan P2K melalui sms blast, WA dan telpon;Membuat program penyelesaian tunggakan kredit;Membuat action plan nasabah NPL;Kelompokkan PPAP berdasarkan jatuh tempo;Analisa pengikatannya nasabah yang tertunggak;Nasabah existing data harus update agar dapat dihubungi setiap saat;Menargetkan nasabah middle dan nasabah priority untuk focus dikembangkan;Evaluasi nasabah retail;Memantau likuiditas harian;Up selling penabung middle dan Cut Off penabung retail (kecil);Meningkatkan kompetensi secara rutin untuk generasi kedepan;Masing plafon kredit untuk fokus dikembangkan;Mengolah data kredit yang tunggakan nol, menjadi target kredit untuk dikembangkan;Cari usaha yang produktif;Mitigasi risiko untuk mengantisipasi tunggakan , nasabah dropping diwajibkan ikut program tabungan;Bekerjasama dengan BPJS, targetkan nasabah BPJS TK untuk menjadi kredit;Jalur AO yang dilalui menjadi target jalur pengembangan;Evaluasi adanya mesin EDC terhadap produktifitas;Buat event-event untuk menggaet nasabah baru;Fokus pada dana murah;Buat pelatihan-pelatihan diperbanyak khususnya dibagian kredit;Pelatihan APU PPT agar dilaksanakan;Pengamanan dokumen slip harus rapi;Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi nya untuk program APU,PPT,dan PPPSPM.
10	26-10-2023	3	Fokus mengembangkan kredit dengan suku bunga anuitas dan tetap bekerjasama dengan pihak komunal dengan plafon kredit yang di batasi;Mengolah data lunas lancar untuk ditargetkan kembali menjadi nasabah kredit;Melakukan kompensasi bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan membayar;Meningkatkan kompetensi dan produktifitas AO;Memastikan nasabah dropping baru dengan status lancar tanpa tunggakan;Melakukan branding-branding disekitar wilayah jalur AO;Nasabah existing data harus update agar dapat dihubungi setiap saat;Mencegah NPL baru dengan monitoring dan perbaikan kualitas NPL;Focus penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah;Melakukan penyelesaian untuk NPL;Optimalisasi mobil kas keliling dengan masuk ke komunitas-komunitas;Pengembangan database;Menargetkan top up saldo nasabah yang memiliki dana di bank lain;Kantor kas kembangkan NOA disekitar wilayah kantor kas;Mitigasi risiko untuk mengantisipasi tunggakan;Nasabah dropping diwajibkan ikut program tabungan;Buat pelatihan dibidang kredit khususnya analisa kredit dan reypayment capacity;Buat pelatihan ilmu komunikasi yang baik kepada nasabah;Evaluasi produktifitas SDM karena SDM pilar utama bank;Perencanaan audit APU dan PPT yang berisiko tinggi.
11	15-11-2023	3	Meningkatkan sector ekonomi produktif khususnya dagang dan jasa;Menargetkan satu wilayah untuk pengembangan;Potensi wilayah difokuskan untuk digarap;Membuat data base per maret;Pemulihan PPAP;Pencegahan NPL binaan P2K melalui sms blast dan melalui Desk call;Memberikan shock terapi kepada nasabah melalui surat pemasangan pelang di jaminan;Memantau likuiditas harian dengan melihat aktifitas penarikan dan setoran;Struktur dana murah lebih dipertinggi;Programkan Cross selling dan up selling;Strategikan peningkatan nasabah baru dan branding-branding disekitar wilayah kantor kas dan pusat;Evaluasi plafon kredit; Fokus mengembangkan sektor ekonomi dagang yang memiliki resiko kecil;Evaluasi SDM Marketing;Evaluasi FO setelah menggunakan EDC;Programkan up selling dengan get account one family;Tabungan berjangka targetkan menjadi nasabah kredit;Evaluasi mobil kas untuk diproduktifkan ke komunitas-komunitas;Evaluasi desk call;Action plan dalam hal menurunkan NPL;Konsen pelatihan , FGD dan study banding ke bank atau BPR yang mendekati asset 1 triliun;Perbanyak pelatihan ditahun 2024 dibagian AO khususnya reypayment capacity;Pantau setiap bulan terkait nasabah LTKT, DTTOT , tindak Lanjut Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan BO;Bagi nasabah kategori LTKM segera lakukan CDD dan EDD;Monitoring lebih intens nasabah NPL.
12	21-12-2023	3	Evaluasi dropping di tahun 2023 untuk melihat potensi yang ada;Optimalisasi database internal dalam;Optimalisasi promosi digital dan branding produk;Penyaluran kredit P2P Landing (komunal);Membuat program penyelesaian tunggakan kredit;Membuat action plan nasabah NPL;Melakukan pemantauan histori pembayaran nasabah;Melakukan penagihan WO (Write Off);Optimalisasi nasabah baru untuk mempercepat pertumbuhan;Membentuk marketing executive yang ditempatkan di mobil kas;Mengoimalkan peran dan fungsi jaringan kantor;Branding diwilayah jalur FO yang dilalui;Memasarkan produk dana melalui media sosial;Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan menyesuaikan pelatihan-pelatihan tersebut sesuai RBB;Pemantauan kredit yang sudah direstruk atau dikompensasi perbaikan;Fokuskan penentuan wilayah per AO;Pastikan tujuan penggunaan kredit saat OTS oleh SKAI;Fokus mengembangkan sektor ekonomi dagang berisiko kecil;Evaluasi SMS blast dalam upaya menurunkan tunggakan;Menghitung likuiditas harian;Mengkaji deposito yang akan jatuh tempo sampai dengan Desember 2023;Mengolah data tabungan pasif menjadi aktif;Evaluasi setoran FO dengan produktivitas penggunaan EDC;Evaluasi mobil kas keliling;Hasil temuan audit internal agar segera ditindak lanjuti dan dimonitoring oleh audit terhadap pelaksanaan tindak lanjutnya;Pelaksanaan SOP Antar Jemput Tabungan;Untuk APU,PPT,PPPSPM,Nasabah yang berisiko tinggi dan PEP agar dilakukan pemantauan dengan baik;Penginian data untuk tetap dilakukan;Risiko bagi nasabah tidak ikut asuransi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Ketut Komplit, SH	12	0	100,00
2	Drs. I Gede Budiasa	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230519	Kegiatan Sosial	Pembelian telur ayam untuk stunting anak	Dinas Sosial Provinsi NTB	295.000
2	20230725	Kegiatan Sosial	Pembelian kambing dalam rangka Hari Raya Idul Adha	Masyarakat Dasan Agung, Kota Mataram	3.900.000
3	20230920	Kegiatan Sosial	Pembagian sembako untuk masyarakat dalam rangka ulang tahun BPR Mitra Harmoni Mataram	Masyarakat Dasan Agung, Kota Mataram	4.355.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR	: PT. BPR Mitra Harmoni Mataram
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Langko No. 14 Dasan Agung Mataram
Nomor Telepon	: (0370)-7862718
Modal Inti BPR	: 8.877.369.329,00
Total Aset BPR	: 54.782.789.011,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria dan indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG 1.Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Mitra Harmoni Mataram telah memadai sesuai dengan peraturan OJK. Proses tata kelola telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK, hal ini sebagian besar karena adanya human error. 2. Masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian internal Bank pada seluruh jajaran organisasi. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang terbentuk pada organisasi Bank dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu. 3. Hasil GCG termasuk memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,92	0,75	0,18	1,85	0.370	Sudah sesuai dengan ketentuan yaitu untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah memenuhi komposisi dan kompetensi. Kedua Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan peralihan tugas dan tanggung jawab. Direksi mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi karyawan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,80	0,20	1,95	0.293	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk melindungi kepentingan stakeholder
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Nihil, karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah)
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Dalam hal penanganan benturan kepentingan, BPR telah memiliki pedoman dan prosedur tersendiri tentang penyelesaian benturan kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi pendapatan BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	0,80	0,20	2,10	0.210	Terdapat satu orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satu orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan telah berjalan sesuai prosedur serta perlu untuk terus dimaksimalkan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,80	0,15	2,05	0.205	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, PE SKAI bekerja secara independen sebagai bagian dari fungsi kontrol yang responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Dalam pelaksanaan fungsi audit ekstern, BPR telah menunjuk KAP Drs Henry dan Sugeng dalam mengaudit laporan keuangan BPR Tahun buku 2023
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,86	0,20	2,06	0.206	BPR telah memiliki satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko yang merangkap juga sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan, MR, APU, PPT dan PPPSPM. Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang dituangkan dalam SOP Manajemen Risiko. Dewan Komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang memadai mengenai BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Rencana bisnis disusun dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat, memegang prinsip kehati-hatian, serta melihat faktor eksternal dan internal. Rencana bisnis dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi misi BPR
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,20	1,90	0.143	Dalam hal pelaporan, sudah ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan dikirimkan tepat waktu. Dalam penyusunan dan penyajian laporan juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Anggota Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 org, dan salah satunya membawahkan fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kedudukan BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi BPR MHM tidak melakukan rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain. Sampai dengan saat ini salah satu Direksi tercatat sebagai Sekjen pada asosiasi Perbarindo NTB.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga (antara Dirut dengan Direktur).
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Anggota Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,83	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,92	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan secara independen dan di dalam pelaksanaan tugas Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor eksternal (OJK) dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Temuan auditor baik internal maupun eksternal (OJK) telah ditindaklanjuti.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Untuk pelaporan dan penyampaian data telah dilakukan Direksi kepada Dewan komisaris, salah satunya melalui rapat bulanan.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi dalam mengambil kebijakan strategis telah melalui musyawarah mufakat, baik dengan Dekom dan Pejabat Eksekutif.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR dalam hal kepentingan pribadi.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi mengikutsertakan karyawannya dalam pendidikan dan pelatihan , tentunya pelatihan pendidikan tersebut sesuai dengan posisi jabatan karyawan itu sendiri.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya, hal ini dapat terlihat dari hasil performance kantor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahun Direksi secara rutin telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan kantor mengenai kepegawaian telah dikomunikasikan kepada para karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi telah dibuatkan risalah rapat dan juga daftar hadir (absensi).
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Pengetahuan Direksi dan karyawan telah mengalami peningkatan karena adanya pendidikan juga pelatihan. Namun, untuk pencapaian kantor belum dapat maksimal sesuai dengan ekspektasi dari stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan Penerapan tata kelola telah dilaporkan setiap tahunnya oleh BPR baik ke OJK, Asosiasi BPR dan 1 kantor media dan/atau majalah ekonomi
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Telah terpenuhi dengan adanya 2 Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	BPR MHM saat ini terdiri dari 2 org Direksi dan 2 org Dewan Komisaris, sehingga jumlahnya tidak melebihi dari yang diatur oleh POJK Tentang Tata Kelola
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan,serta proses perpanjangan melalui RUPS juga telah dilakukan sebelum masa berakhir jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Tidak terdapat Dewan komisaris yang berdomisili pada 1 provinsi yang sama dengan kedudukan kantor. Namun, Dewan komisaris berdomisili pada provinsi berbeda yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Tidak terdapat Komisaris Independen karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris dalam hal ini terkait dengan rangkap jabatan, memiliki posisi yang sama dan tidak lebih dari 2 BPR.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dekom dan Direksi tidak memiliki hubungan atau semenda sampai derajat kedua (sesama Dekom atau Direksi).

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris BPR MHM selama ini selalu independen dan tanpa pengaruh dari pihak lain.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	1,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi, nasihat terkait pemenuhan ketentuan BPR sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan Dewan Komisaris melalui rapat bulanan.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. Hal ini juga dilakukan melalui rapat bulanan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris selalu memastikan tindak lanjut Direksi atas temuan audit intern maupun ekstern. Hal ini dilakukan melalui rapat bulanan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan menyediakan waktu untuk mencari informasi dan data guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan keterbatasan jarak, yaitu berbeda propinsi sehingga pengawasan melalui media komunikasi dan beberapa kali secara tatap muka.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis telah berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dekom tidak menggunakan BPR demi kepentingan pribadinya.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan melalui rapat gabungan Direksi dan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, daftar hadir, serta didokumentasikan pada saat rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang penyelesaian benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sampai saat ini tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sampai saat ini tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani seluruh kegiatan operasional termasuk dalam hal penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan perundang-undangan yg berkaitan dengan perbankan dan telah lulus uji kemampuan fit and proper test dari OJK terkait dengan posisi sebagai Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Telah terdapat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yg menangani fungsi Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan beberapa pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Telah terdapat ketentuan internal berupa job desk mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab terkait dengan PE Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	BPR MHM dalam hal ini selalu melakukan pengkinian atas setiap peraturan POJK dan peraturan lainnya yg berkaitan dengan perbankan. Jika diperlukan Direksi juga segera membuat SOP serta SK Direksi guna memberlakukan SOP terkait dengan setiap peraturan baru yang berkaitan langsung dengan perbankan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR menerbitkan SOP dan sekaligus mengeluarkan SK Direksi guna pemberlakuan SOP tersebut. setelah diberlakukan, BPR MHM melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan BPR.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memantau seluruh komitmen BPR dgn OJK. Serta dalam pengambilan kebijakan oleh Direksi, Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan selalu melihat dan berpedoman pada peraturan yg ada.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan UU.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah mereview serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Terdapat penurunan frekuensi pelanggaran

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Terkait dengan pelaporan berkala yg merujuk pada Pasal 53 (1), BPR MHM tidak menerapkan dikarenakan modal inti BPR saat ini kurang dari 50 M. Namun, terkait dengan pasal 53 (2), BPR MHM selalu dan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dirut dengan tembusan Dekom.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai saat ini tidak ada keputusan Direksi yg menyimpang, sehingga BPR MHM tidak menyampaikan laporan khusus kepada OJK terkait penyimpangan atas ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki PE yang bertanggungjawab atas Kepatuhan.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI dalam pelaksanaan tugas tanggungjawabnya telah bersifat independen.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI bertanggungjawab langsung kepada Dirut.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Belum ada rekrutmen SDM terkait fungsi SKAI, namun untuk pengembangan SDM terkait SKAI suda sering dilakukan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Telah ditetapkan fungsi audit yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, salah satunya adalah dengan rutin melakukan OTS.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Skala penerapan nilai 2 karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Telah diupayakan untuk dapat berjalan dengan maksimal guna mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR beberapa kali melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM terkait fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE SKAI BPR MHM untuk setiap bulannya telah menyampaikan secara rutin laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Dirut dan Dekom dengan tembusan kepada Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Skala penerapan nilai 2 karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR MHM telah menyampaikan setiap perubahan bila terjadi pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Telah sesuai dengan aspek-aspek legalitas dan telah tertuang pada Risalah Rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil KAP selalu disampaikan sebelum tanggal akhir pelaporan.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai dan dirasa telah mencakup.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Terdapat SOP kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Terdapat SK yang mengatur aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun SOP Manajemen Risiko serta melakukan evaluasi pada rapat bulanan serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris memberikan arahan dan evaluasi terkait manajemen risiko pada setiap rapat bulanan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR MHM telah memiliki unit kerja audit internal yang bertanggung jawab dalam pengendalian sistem internal secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR MHM telah menerapkan manajemen risiko untuk empat risiko sesuai ketentuan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai namun masih terkendala oleh CBS (Core banking sistem) yang belum dapat secara efektif memberikan informasi secara cepat
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait risiko terhadap suatu aktivitas atau produk baru
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan profil risiko telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK melalui sistem APOLO
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan produk atau aktivitas baru kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Telah diterbitkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan evaluasi secara berkala
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Tidak terjadi pelanggaran untuk pemberian kredit besar dan kepada pihak terkait
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat pelanggaran BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ditemukan pelanggaran dan atau pelampauan BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB BPR MHM telah disusun sesuai dengan visi misi Bank, serta RBB ini telah disetujui oleh Dekom.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RRB yang disusun oleh Direksi telah mencakup rencana ke depan (menengah dan panjang).
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB yang dibuat sepenuhnya telah didukung oleh pemegang saham, yang mana RBB ini memiliki tujuan guna memajukan BPR.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Telah mempertimbangkan segala sisi, termasuk manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris melakukan pengawasan baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui media telekomunikasi.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dan selalu disampaikan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh sistem dan SDM yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan triwulanan telah dipublikasikan dan ditempel di bagian dalam ruangan kantor yang mudah dilihat oleh nasabah atau masyarakat.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi produk telah dilakukan oleh BPR, sebelum melakukan transaksi baik Tabungan, Deposito dan Kredit selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada para calon nasabah tersebut.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tata cara laporan telah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan telah disampaikan tepat waktu dan ditandatangani oleh 2 org direksi.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Pelaporan secara online melalui SIPEDULI, tetapi terdapat satu kali keterlambatan sehingga menimbulkan denda sebesar Rp 50.000.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Mitra Harmoni Mataram yang telah disusun oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta SEOJK No.24/ SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Mitra Harmoni Mataram. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Mataram, 18 Januari 2024

PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM


bank
mitra harmoni
bpr mitra harmoni
Agus Sutanto, ST
Direktur Utama


Ketut Komplit, SH
Komisaris Utama

BAB IX

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2023, diharapkan semua jajaran dalam organisasi memahami dan mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut. Jika di dalam pelaksanaannya nanti masih terdapat kekurangan atau kurang sempurna, maka pihak Manajemen Bank akan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar penerapan *Good Corporate Governance* di bank ini dapat berjalan secara maksimal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan oleh semua unsur pengelola bank.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Januari 2024

BPR MITRA HARMONI MATARAM



I Gede Rai Yudiatmika, SE.
Direktur

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.370	0.293	-	0.200	0.210	0.205	0.050	0.206	0.146	0.143	0.143	2.0
Predikat Komposit	2 (Baik)											

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian atas pelaksanaan tata kelola, dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola pada PT. BPR Mitra Harmoni Mataram adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - Sudah sesuai dengan ketentuan yaitu untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah memenuhi komposisi dan kompetensi. Kedua Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak pernah memeberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan peralihan tugas dan tanggung jawab. Direksi mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi karyawan.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk melindungi kepentingan stakeholder
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
 - Nihil, karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah)
4. Penanganan benturan kepentingan
 - Dalam hal penanganan benturan kepentingan, BPR telah memliki pedoman dan prosedur

tersendiri tentang penyelesaian benturan kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi pendapatan BPR.

5. Penerapan fungsi kepatuhan
 - Terdapat satu orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satu orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan telah berjalan sesuai prosedur serta perlu untuk terus dimaksimalkan.
6. Penerapan fungsi audit intern
 - BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, PE SKAI bekerja secara independen sebagai bagian dari fungsi kontrol yang responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi
7. Penerapan fungsi audit ekstern
 - Dalam pelaksanaan fungsi audit ekstern, BPR telah menunjuk KAP Drs Henry dan Sugeng dalam mengaudit laporan keuangan BPR Tahun buku 2023
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
 - BPR telah memiliki satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko yang merangkap juga sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan, MR, APU, PPT dan PPPSPM. Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang dituangkan dalam SOP Manajemen Risiko. Dewan Komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko.
9. Batas maksimum pemberian kredit
 - BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang memadai mengenai BMPK.
10. Rencana bisnis BPR
 - Rencana bisnis disusun dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat, memegang prinsip kehati-hatian, serta melihat faktor eksternal dan internal. Rencana bisnis dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi misi BPR.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
 - Dalam hal pelaporan, sudah ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan dikirimkan tepat waktu. Dalam penyusunan dan penyajian laporan juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.